

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 31 JAN 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA



**N. AMAN YURIADUAYA, M.M.**  
NIP. 196512131992031006

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat meningkat dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung;
2. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD;
3. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator indeks perekonomian;
4. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan; dan
5. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik.

Hasil capaian lima sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung ditargetkan mencapai 40,59, tercapai 42,19 dengan tingkat capaian indikator 103,94%;
2. Indikator nilai EKPPD ditargetkan masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), tercapai 3,4581 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat capaian indikator 100%;
3. Indikator indeks perekonomian ditargetkan mencapai 69,73, tercapai 73,05 dengan tingkat capaian indikator 104,77%;
4. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai angka indeks 95,4 tercapai 93,36 (data per 4 Januari 2023) dengan tingkat capaian indikator 97,86%; dan
5. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 81 tercapai 81,4 dengan tingkat capaian indikator 100,49%.

Realisasi anggaran belanja (termasuk gaji dan belanja operasional kepala daerah) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 47.377.572.722,19 dari total anggaran sebesar Rp 50.415.357.255.

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu Strategis.....	14
1.4 Keadaan Pegawai .....	16
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	20
1.6 Keuangan .....	25
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	27
2.1 Perencanaan Strategis .....	27
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	27
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	28
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	33
2.2 Perjanjian Kinerja .....	36
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	37
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah.....	39
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	42
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	42

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

3.2	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	43
3.2.1	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatkan ..	43
3.2.2	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan .....	49
3.2.3	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan .....	52
3.2.4	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan .....	56
3.2.5	Sasaran Strategis Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan.....	59
3.2.6	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Dengan Target .....	61
3.2.7	Realisasi Program Sekretariat Daerah .....	64
3.3	Realisasi Anggaran .....	69
3.4	Inovasi.....	73
BAB IV PENUTUP .....		76

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah .....	16
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan .....	17
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon .....	17
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	17
Tabel 1.5 Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan .....	18
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi.....	18
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah.....	20
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 .....	27
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah .....	29
Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	34
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022 .....	36
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022 .....	37
Tabel 2.6 Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	39
Tabel 2.7 Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2022 .....	39
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis .....	41
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	42
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	42
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2022.....	44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya .....	44
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD.....	45
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional. 47	
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Perekonomian Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan Dengan Tahun Sebelumnya .....	50

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat .....	51
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022.....	53
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya .....	53
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan .....	53
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 .....	56
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022.....	57
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya...	57
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelayanan Publik .....	58
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan Tahun 2022 .....	60
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan Dengan Tahun Sebelumnya .....	60
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan .....	60
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan Tahun 2022.....	63
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan Dengan Tahun Sebelumnya .....	63
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan.....	63
Tabel 3.24 Realisasi Program ( <i>Outcome</i> ) Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	64
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	69
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2022 .....	69
Tabel 3.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2022 .....	71
Tabel 3.28 Analisis Efisiensi.....	72

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama Aplikasi SIAP.....	73
Gambar 3.2 Tampilan Menu Progres Tender Aplikasi SIAP.....	74
Gambar 3.3 Tampilan Menu Monev Paket Tender Aplikasi SIAP .....	74

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2021. Isi LKIP Setda tahun 2022 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2022.

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

### 1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
    - a) Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan;
    - b) Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
    - c) Kelompok Substansi Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    - a) Kelompok Substansi Bina Mental;
    - b) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
    - c) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
  - 3) Bagian Hukum, yang membawahi:
    - a) Kelompok Substansi Perundang-undangan;
    - b) Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c) Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  - 1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - a) Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan;
    - b) Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
  - 2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama, terdiri atas:
    - a) Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif;
    - b) Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
    - c) Kelompok Substansi Kerjasama Daerah.

- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
  - a) Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c) Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  - 1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
    - b) Sub Bagian Protokol; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
    - a) Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda;
    - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
    - c) Sub Bagian Administrasi Umum.
  - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
    - b) Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
    - c) Kelompok Substansi Reformasi Birokrasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan:  
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan

---

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 3) pengoordinasian perumusan bahan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas Pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 2) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  - 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
- 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;

- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

Melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
- 4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;

- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

5. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

- 
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
  - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
  - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
  - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
  - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
  - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.
6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.
- Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
  - 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
  - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

- 
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
  - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
  - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.
- Fungsi Bagian Umum dan Protokol:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;
  - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

- 
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
  - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
  - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
  - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;
  - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
  - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan
  - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.
8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan:
- Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.
- Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;
  - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

- 
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
  - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
  - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
  - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
  - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
  - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
  - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
  - 10) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
  - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan
9. Tugas pokok Bagian Organisasi:
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Organisasi;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
- 8) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
- 11) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
- 12) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

### **1.3 Isu Strategis**

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen

---

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait pemberdayaan masyarakat
  - a. Pengembalian dana hibah oleh Mitra OPD diakhir tahun, dan adanya keterlambatan laporan pada OPD Pengampu Anggaran, sehingga mempengaruhi capaian keuangan yang tidak maksimal; dan
  - b. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
  - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Yogyakarta;
  - b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan data yang perlu diisi belum tentu tersedia; dan
  - c. Penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
  - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi;
  - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan
  - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
4. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
  - a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
  - b. Penyelarasan budaya kerja SATRIYA dengan BERAKHLAK;
  - c. Penyederhanaan birokrasi menuju birokrasi yang *agile*;
  - d. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
  - e. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan;
  - f. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan di tingkat setda.

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 249 orang (data per bulan Desember 2022), dengan rincian 162 orang PNS dan 87 orang Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP). Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 330 orang, dengan demikian baru terpenuhi 75,45% termasuk JLOP dan 49,09% apabila tanpa JLOP. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>PNS</b>	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 orang
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	1 orang
Staf Ahli	2 orang
Kepala Bagian	8 orang
Kepala Sub Bagian/ Sub Koordinator	27 orang
Fungsional	121 orang
<b>Non PNS</b>	
JLOP	87 orang
<b>TOTAL</b>	<b>249 orang</b>

**Tabel 1.2**

**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV	19 orang
III	124 orang
II	19 orang
I	- orang
<b>TOTAL</b>	<b>162 orang</b>

**Tabel 1.3**

**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon**

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
II	6 orang
III	8 orang
IV / Sub Koordinator	27 orang
Fungsional	121 orang
<b>TOTAL</b>	<b>162 orang</b>

**Tabel 1.4**

**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
S2	29 orang	17,90%
S1	91 orang	56,17%
D3	14 orang	8,64%
SMA/SMK	28 orang	17,28%
SMP	- orang	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>162 orang</b>	<b>100%</b>

**Tabel 1.5**  
**Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	3 orang	3,45%
S1	40 orang	45,98%
D3	11 orang	12,64%
D2	1 orang	1,15%
SMA/SMK	27 orang	31,03%
SMP	5 orang	5,75%
<b>TOTAL</b>	<b>87 orang</b>	<b>100%</b>

**Tabel 1.6**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi**

Organisasi	Golongan				JLOP	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1					1 orang
Asisten Perekonomian	1					1 orang
Asisten Umum	1					1 orang
Staf Ahli	2					2 orang
<b>Bagian Umum dan Protokol</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		15	5			20 orang
Staf non PNS (JLOP)					39	39 orang
<b>Bagian Organisasi</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian/ Sub Koordinator		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)	1	13	1			15 orang
Staf non PNS (JLOP)					6	6 orang

Organisasi	Golongan				JLOP	Jumlah
	IV	III	II	I		
<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		9				9 orang
Staf non PNS (JLOP)					6	6 orang
<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator	1	2				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		9				9 orang
Staf non PNS (JLOP)					5	5 orang
<b>Bagian Hukum</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator	1	2				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)	1	11	1			13 orang
Staf non PNS (JLOP)					5	5 orang
<b>Bagian Administrasi dan Keuangan</b>						
Kepala Bagian						- orang
Kepala Sub Bagian/ Sub Koordinator		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		4	7			11 orang
Staf non PNS (JLOP)					8	8 orang
<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		6	2			8 orang
Staf non PNS (JLOP)					7	7 orang
<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator	1	2				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		25	2			27 orang
Staf non PNS (JLOP)					7	7 orang

Organisasi	Golongan				JLOP	Jumlah
	IV	III	II	I		
<b>Bagian Perekonomian dan Kerjasama</b>						
Kepala Bagian	1					1 orang
Sub Koordinator		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		8	1			9 orang
Staf non PNS (JLOP)					4	4 orang
<b>TOTAL</b>						<b>249 orang</b>

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7**  
**Daftar Inventaris Sekretariat Daerah**

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
1	1.3.02.01.03.0004.002	Portable Generating Set	Unit	4	564.763.669,98
2	1.3.02.01.03.0004.003	Stationary Generating Set	Unit	1	152.889.397,60
3	1.3.02.01.03.0005.010	Pompa Air	Unit	20	69.890.312,19
4	1.3.02.02.01.0001.001	Sedan	Unit	2	1.179.573.412,40
5	1.3.02.02.01.0001.002	Jeep	Unit	2	719.033.284,20
6	1.3.02.02.01.0001.003	Station Wagon	Unit	27	6.731.141.443,90
7	1.3.02.02.01.0001.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	Unit	3	1.383.000.000,00
8	1.3.02.02.01.0002.002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Unit	1	840.000.000,40
9	1.3.02.02.01.0002.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	2	1.036.000.000,00
10	1.3.02.02.01.0003.002	Pick Up	Unit	1	92.500.000,00
11	1.3.02.02.01.0004.001	Sepeda Motor	Unit	39	476.514.522,31
12	1.3.02.02.02.0002.001	Sepeda	Unit	22	45.004.217,96
13	1.3.02.03.01.0002.002	Mesin Bor Tangan	Unit	1	820.000,00
14	1.3.02.03.02.0005.001	Tool Kit Set	Unit	1	743.000,00
15	1.3.02.03.03.0001.072	Global Positioning System	Unit	2	14.150.000,00
16	1.3.02.03.03.0009.000	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Unit	11	7.321.506,71
17	1.3.02.04.01.0002.006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Unit	1	250.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
18	1.3.02.05.01.0001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Unit	3	2.725.000,00
19	1.3.02.05.01.0001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Unit	5	8.369.014,37
20	1.3.02.05.01.0001.003	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inchi)	Unit	2	4.506.950,00
21	1.3.02.05.01.0002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	24	3.576.977,94
22	1.3.02.05.01.0002.010	Mesin Absen (Time Recorder)	Unit	7	27.777.943,76
23	1.3.02.05.01.0004.000	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Unit	22	262.677.371,98
24	1.3.02.05.01.0004.001	Lemari Besi/Metal	Unit	59	105.132.353,14
25	1.3.02.05.01.0004.002	Lemari Kayu	Unit	95	197.634.340,80
26	1.3.02.05.01.0004.003	Rak Besi	Unit	12	15.220.221,33
27	1.3.02.05.01.0004.004	Rak Kayu	Unit	47	154.661.250,36
28	1.3.02.05.01.0004.005	Filing Cabinet Besi	Unit	119	213.318.500,63
29	1.3.02.05.01.0004.007	Brandkas	Unit	9	20.443.000,00
30	1.3.02.05.01.0004.009	Kardex Besi	Unit	3	2.960.362,02
31	1.3.02.05.01.0004.026	Lemari Sorok	Unit	29	16.563.625,00
32	1.3.02.05.01.0004.027	Lemari Kaca	Unit	16	58.323.078,12
33	1.3.02.05.01.0005.000	ALAT KANTOR LAINNYA	Unit	6	3.739.500,00
34	1.3.02.05.01.0005.002	CCTV - Camera Control Television System	Unit	6	54.943.924,34
35	1.3.02.05.01.0005.003	Papan Visual/Papan Nama	Unit	8	123.292.909,50
36	1.3.02.05.01.0005.005	White Board	Unit	39	181.832.529,68
37	1.3.02.05.01.0005.010	Alat Penghancur Kertas	Unit	2	2.678.000,00
38	1.3.02.05.01.0005.012	Mesin Absensi	Unit	1	3.197.500,00
39	1.3.02.05.01.0005.020	Headmachine Besar	Unit	1	490.000,00
40	1.3.02.05.01.0005.032	White Board Electronic	Unit	3	40.365.000,00
41	1.3.02.05.01.0005.033	Laser Pointer	Unit	5	2.352.975,00
42	1.3.02.05.01.0005.043	LCD Projector/Infocus	Unit	48	316.548.381,46
43	1.3.02.05.01.0005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	14	14.264.383,16
44	1.3.02.05.01.0005.077	Papan Pengumuman	Unit	2	9.452.859,00
45	1.3.02.05.02.0001.000	MEUBELAIR	Unit	76	409.148.646,01
46	1.3.02.05.02.0001.001	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	6	1.247.500,00
47	1.3.02.05.02.0001.002	Meja Kerja Kayu	Unit	115	342.934.138,13
48	1.3.02.05.02.0001.003	Kursi Besi/Metal	Unit	64	36.585.500,00
49	1.3.02.05.02.0001.004	Kursi Kayu	Unit	88	22.991.356,62
50	1.3.02.05.02.0001.005	Sice	Unit	19	72.676.162,72
51	1.3.02.05.02.0001.008	Meja Rapat	Unit	275	406.027.005,84
52	1.3.02.05.02.0001.009	Tempat Tidur Besi	Unit	10	74.740.233,30
53	1.3.02.05.02.0001.010	Tempat Tidur Kayu	Unit	7	22.511.500,00
54	1.3.02.05.02.0001.011	Meja Ketik	Unit	11	2.360.000,00
55	1.3.02.05.02.0001.012	Meja Telepon	Unit	36	11.387.995,39
56	1.3.02.05.02.0001.013	Meja Podium	Unit	2	4.925.000,00
57	1.3.02.05.02.0001.014	Meja Resepsionis	Unit	2	16.445.708,95
58	1.3.02.05.02.0001.016	Meja Tambahan	Unit	5	2.992.500,00
59	1.3.02.05.02.0001.017	Meja Panjang	Unit	9	1.700.000,00
60	1.3.02.05.02.0001.024	Meja 1/2 Biro	Unit	154	165.501.880,20
61	1.3.02.05.02.0001.025	Kasur/Spring Bed	Unit	12	62.518.308,77
62	1.3.02.05.02.0001.028	Meja Makan Kayu	Unit	13	168.538.220,50
63	1.3.02.05.02.0001.030	Kursi Rapat	Unit	822	334.816.465,75
64	1.3.02.05.02.0001.031	Kursi Tamu	Unit	5	20.589.500,00
65	1.3.02.05.02.0001.032	Kursi Putar	Unit	292	236.699.489,46

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
66	1.3.02.05.02.0001.033	Kursi Biasa	Unit	36	56.838.000,00
67	1.3.02.05.02.0001.035	Bangku Tunggu	Unit	8	14.901.530,58
68	1.3.02.05.02.0001.036	Kursi Lipat	Unit	278	92.780.977,73
69	1.3.02.05.02.0001.039	Meja Komputer	Unit	58	42.455.398,30
70	1.3.02.05.02.0001.048	Sofa	Unit	13	119.353.438,10
71	1.3.02.05.02.0001.049	Meja Rias	Unit	6	24.500.000,00
72	1.3.02.05.02.0002.000	ALAT PENGUKUR WAKTU	Unit	8	1.485.648,32
73	1.3.02.05.02.0002.001	Jam Mekanis	Unit	20	30.670.664,63
74	1.3.02.05.02.0002.003	Jam Elektronik	Unit	35	9.345.139,17
75	1.3.02.05.02.0003.001	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	Unit	6	10.562.250,16
76	1.3.02.05.02.0003.003	Mesin Pemotong Rumput	Unit	4	6.694.000,00
77	1.3.02.05.02.0003.004	Mesin Cuci	Unit	3	10.143.967,30
78	1.3.02.05.02.0004.000	ALAT PENDINGIN	Unit	35	208.406.133,54
79	1.3.02.05.02.0004.001	Lemari Es	Unit	22	65.164.362,99
80	1.3.02.05.02.0004.002	A.C. Sentral	Unit	2	45.000.000,00
81	1.3.02.05.02.0004.003	A.C. Window	Unit	4	94.000.000,00
82	1.3.02.05.02.0004.004	A.C. Split	Unit	107	533.809.751,98
83	1.3.02.05.02.0004.006	Kipas Angin	Unit	34	37.505.535,35
84	1.3.02.05.02.0004.007	Exhause Fan	Unit	23	7.696.938,66
85	1.3.02.05.02.0004.012	Cold Room Frezzer	Unit	3	2.025.000,00
86	1.3.02.05.02.0005.000	ALAT DAPUR	Unit	3	2.900.763,29
87	1.3.02.05.02.0005.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Unit	3	2.928.174,92
88	1.3.02.05.02.0005.008	Kitchen Set	Unit	1	5.000.000,00
89	1.3.02.05.02.0005.009	Tabung Gas	Unit	3	1.559.766,06
90	1.3.02.05.02.0006.000	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Unit	93	404.290.997,93
91	1.3.02.05.02.0006.001	Radio	Unit	3	3.749.924,51
92	1.3.02.05.02.0006.002	Televisi	Unit	56	286.210.354,41
93	1.3.02.05.02.0006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Us	Unit	3	1.880.500,00
94	1.3.02.05.02.0006.005	Amplifier	Unit	1	3.260.000,00
95	1.3.02.05.02.0006.007	Loudspeaker	Unit	22	226.638.000,00
96	1.3.02.05.02.0006.008	Sound System	Unit	17	287.279.828,17
97	1.3.02.05.02.0006.012	Wireless	Unit	8	45.860.333,50
98	1.3.02.05.02.0006.014	Microphone	Unit	2	10.630.000,00
99	1.3.02.05.02.0006.015	Microphone Floor Stand	Unit	15	6.687.001,00
100	1.3.02.05.02.0006.017	Mic Conference	Unit	1	41.950.000,00
101	1.3.02.05.02.0006.020	Stabilisator	Unit	9	35.989.349,94
102	1.3.02.05.02.0006.021	Camera Video	Unit	4	41.728.215,19
103	1.3.02.05.02.0006.022	Camera film	Unit	2	4.136.000,00
104	1.3.02.05.02.0006.023	Tustel	Unit	2	4.222.185,02
105	1.3.02.05.02.0006.027	Alat Hiasan	Unit	4	700.000,00
106	1.3.02.05.02.0006.028	Lambang Garuda Pancasila	Unit	14	636.000,00
107	1.3.02.05.02.0006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	35	10.006.400,00
108	1.3.02.05.02.0006.030	Lambang Korpri/Dharma Wanita	Unit	1	35.000,00
109	1.3.02.05.02.0006.032	Tiang Bendera	Unit	7	580.000,00
110	1.3.02.05.02.0006.033	Pataka	Unit	1	250.000,00
111	1.3.02.05.02.0006.036	Tangga Aluminium	Unit	7	12.742.253,43
112	1.3.02.05.02.0006.037	Kaca Hias	Unit	15	8.133.000,00
113	1.3.02.05.02.0006.038	Dispenser	Unit	33	66.654.816,18
114	1.3.02.05.02.0006.039	Mimbar/Podium	Unit	2	4.980.000,00
115	1.3.02.05.02.0006.044	Lambang Instansi	Unit	4	4.419.319,50

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
116	1.3.02.05.02.0006.047	Coffee Maker	Unit	3	99.900.000,00
117	1.3.02.05.02.0006.048	Handy Cam	Unit	1	8.979.557,80
118	1.3.02.05.02.0007.001	Alat Pemadam/Portable	Unit	2	1.056.000,00
119	1.3.02.05.03.0001.001	Meja Kerja Pejabat	Unit	18	31.459.687,00
120	1.3.02.05.03.0001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	6	9.345.072,40
121	1.3.02.05.03.0002.000	Meja Rapat Pejabat	Unit	21	51.714.108,48
122	1.3.02.05.03.0002.013	Meja Operator	Unit	1	500.000,00
123	1.3.02.05.03.0003.000	Kursi Kerja Pejabat	Unit	10	28.253.442,95
124	1.3.02.05.03.0003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	43	44.897.136,75
125	1.3.02.05.03.0004.001	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	Unit	84	108.388.000,00
126	1.3.02.05.03.0004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	3	468.000,00
127	1.3.02.05.03.0005.000	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Unit	34	18.321.570,34
128	1.3.02.05.03.0006.001	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Unit	10	35.590.347,14
129	1.3.02.05.03.0007.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	8	35.138.036,61
130	1.3.02.05.03.0007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	7	29.000.000,00
131	1.3.02.05.03.0007.008	Buffet Kayu	Unit	12	24.336.919,00
132	1.3.02.06.01.0001.000	PERALATAN STUDIO AUDIO	Unit	29	159.981.627,39
133	1.3.02.06.01.0001.016	Compact Disc Player	Unit	4	5.717.101,37
134	1.3.02.06.01.0001.036	Microphone/Wireless MIC	Unit	35	96.986.493,17
135	1.3.02.06.01.0001.041	Professional Sound System	Unit	11	197.898.252,48
136	1.3.02.06.01.0001.042	Audio Master Control Unit	Unit	9	62.536.890,87
137	1.3.02.06.01.0001.045	Master Clock (Peralatan Studio Audio)	Unit	3	2.250.000,00
138	1.3.02.06.01.0001.055	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	2	38.100.000,00
139	1.3.02.06.01.0001.059	Power Amplifier	Unit	17	209.769.000,00
140	1.3.02.06.01.0001.064	Chairman/Audio Conference	Unit	12	163.574.646,10
141	1.3.02.06.01.0001.075	Digital Audio Taperecorder	Unit	4	4.377.275,67
142	1.3.02.06.01.0002.057	Slide Projector	Unit	6	40.832.582,06
143	1.3.02.06.01.0002.070	Servo Zoom Lens	Unit	2	5.256.000,00
144	1.3.02.06.01.0002.126	Camera Digital	Unit	21	124.608.144,46
145	1.3.02.06.01.0005.007	Sketch Master	Unit	3	1.505.000,00
146	1.3.02.06.02.0001.000	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Unit	2	4.250.000,00
147	1.3.02.06.02.0001.001	Telephone (PABX)	Unit	24	12.300.000,00
148	1.3.02.06.02.0001.003	Pesawat Telephone	Unit	20	12.549.697,42
149	1.3.02.06.02.0001.004	Telephone Mobile	Unit	2	23.120.020,00
150	1.3.02.06.02.0001.006	Handy Talky (HT)	Unit	34	98.645.727,09
151	1.3.02.06.02.0001.007	Telex	Unit	2	3.763.744,64
152	1.3.02.06.02.0001.010	Facsimile	Unit	7	11.011.905,40
153	1.3.02.06.03.0008.001	Antene VHF/FM Portable	Unit	2	2.827.500,00
154	1.3.02.07.01.0001.000	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Unit	14	20.400.000,00
155	1.3.02.08.01.0006.055	Alat Pemeriksa Beton	Unit	1	52.803.906,04
156	1.3.02.08.01.0006.062	Concrette Hammer Set	Unit	1	20.070.000,00
157	1.3.02.10.01.0002.001	P.C Unit	Unit	148	1.210.398.441,85
158	1.3.02.10.01.0002.003	Note Book	Unit	134	1.029.303.827,30
159	1.3.02.10.01.0002.009	Tablet PC	Unit	6	29.446.698,64

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
160	1.3.02.10.02.0003.000	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Unit	4	1.709.000,00
161	1.3.02.10.02.0003.002	Monitor	Unit	2	3.241.826,65
162	1.3.02.10.02.0003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	98	282.756.164,98
163	1.3.02.10.02.0003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	23	81.811.541,98
164	1.3.02.10.02.0003.017	External/ Portable Hardisk	Unit	59	52.289.000,00
165	1.3.02.10.02.0004.001	Server	Unit	2	798.000,00
166	1.3.02.10.02.0005.000	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Unit	11	20.530.747,65
167	1.3.02.10.02.0005.001	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Unit	83	74.417.141,61
168	1.5.04.01.01.0001.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Unit	802	403.528.660,57
	<b>Jumlah KIB B</b>			<b>5.728</b>	<b>25.610.071.194,60</b>
169	1.3.03.01.01.0001.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	M <sup>2</sup>	3	154.870.000,00
170	1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M <sup>2</sup>	13	17.555.658.425,44
171	1.3.03.01.01.0008.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	M <sup>2</sup>	3	4.936.896.311,48
172	1.3.03.01.01.0009.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	M <sup>2</sup>	8	185.620.664,74
173	1.3.03.01.01.0010.003	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	M <sup>2</sup>	1	1.500.000,00
174	1.3.03.01.01.0012.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	M <sup>2</sup>	1	385.840.000,00
175	1.3.03.01.01.0013.001	Gedung Pos Jaga Permanen	M <sup>2</sup>	6	247.211.386,97
176	1.3.03.01.01.0014.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	M <sup>2</sup>	3	144.130.000,00
177	1.3.03.01.01.0014.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	M <sup>2</sup>	1	15.017.500,00
178	1.3.03.01.01.0032.001	Bangunan Tempat Parkir	M <sup>2</sup>	2	39.963.600,00
179	1.3.03.01.01.0036.002	Taman Semi Permanen	M <sup>2</sup>	2	395.400.000,00
180	1.3.03.01.02.0001.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	M <sup>2</sup>	3	8.318.743.682,00
181	1.3.03.04.01.0004.001	Pagar Permanen	M <sup>2</sup>	1	200.021.545,53
	<b>Jumlah KIB C</b>			<b>47</b>	<b>32.580.873.116,16</b>
182	1.3.04.02.05.0005.001	Bak Penampung/ Kolam/ Menara Penampungan	M <sup>2</sup>	2	196.029.419,90
183	1.3.04.04.02.0002.000	JARINGAN DISTRIBUSI	M <sup>2</sup>	1	47.244.507,30
	<b>Jumlah KIB D</b>			<b>3</b>	<b>243.273.927,20</b>
184	1.3.05.01.01.0001.000	BUKU UMUM	Unit	54	4.036.615,04
185	1.3.05.01.01.0001.003	Ilmu Pengetahuan Umum	Unit	389	37.948.070,00
186	1.3.05.01.01.0001.004	Bibliografi, Katalog	Unit	5	316.000,00
187	1.3.05.01.01.0001.006	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Unit	114	26.882.083,62
188	1.3.05.01.01.0003.001	Agama Islam	Unit	11	704.499,99
189	1.3.05.01.01.0004.000	BUKU ILMU SOSIAL	Unit	21	1.053.600,00
190	1.3.05.01.01.0004.001	Sosiologi	Unit	5	245.825,00
191	1.3.05.01.01.0004.003	Ilmu Politik	Unit	7	353.600,00
192	1.3.05.01.01.0004.004	Ekonomi	Unit	10	800.000,00
193	1.3.05.01.01.0004.005	Hukum	Unit	24	3.474.450,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
194	1.3.05.01.01.0004.006	Administrasi, Pertahanan dan Keamanan	Unit	3	369.800,00
195	1.3.05.01.01.0004.007	Service Umum Sosial	Unit	7	357.000,00
196	1.3.05.01.01.0004.008	Pendidikan	Unit	1	135.000,00
197	1.3.05.01.01.0004.009	Perdagangan	Unit	1	85.000,00
198	1.3.05.01.01.0005.000	BUKU ILMU BAHASA	Unit	1	79.000,00
199	1.3.05.01.01.0005.001	Umum	Unit	1	40.000,00
200	1.3.05.01.01.0007.000	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	Unit	31	3.160.020,00
201	1.3.05.01.01.0007.003	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Unit	1	73.000,00
202	1.3.05.01.01.0007.005	Management dan Perkantoran	Unit	4	201.300,00
203	1.3.05.01.01.0008.007	Musik	Unit	3	102.600,00
204	1.3.05.01.03.0001.001	Peta (Map)	Unit	5	139.826.000,00
205	1.3.05.01.03.0001.002	Atlas	Unit	1	21.000,00
206	1.3.05.02.01.0001.002	Alat Musik Modern/Band	Unit	14	69.185.000,00
207	1.3.05.02.03.0001.001	Piala	Unit	18	2.235.000,00
208	1.3.05.05.01.0001.003	Tanaman Perkebunan	Unit	3	275.000,00
	<b>Jumlah KIB E</b>			<b>734</b>	<b>291.959.463,65</b>
209	1.3.06.01.01.0001.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	M2	1	79.090.000,00
	<b>Jumlah KIB F</b>			<b>1</b>	<b>79.090.000,00</b>
210	1.5.03.01.01.0005.000	SOFTWARE		6	250.462.450,00
211	1.5.03.01.01.0006.000	KAJIAN		53	6.165.861.445,00
	<b>Jumlah KIB Aset Tak Berwujud (ATB)</b>			<b>59</b>	<b>6.416.323.895,00</b>

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 50.415.357.255 dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 50.291.293.255 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 124.064.000, yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## 1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Ringkasan Eksekutif memuat:**

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

**BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

**BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

**BAB IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

**LAMPIRAN**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

**2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022**

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Kemiskinan masyarakat turun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		2. Pertumbuhan ekonomi meningkat
	3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan juga mendukung dalam pencapaian sasaran daerah keberdayaan masyarakat meningkat dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus

memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2022. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
3. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas; dan
4. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis Sekretariat Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Indeks	26,15	27	28	29	40,59	40,59
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)			
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--
		Indeks perekonomian	Indeks	--	--	--	--	64,62	69,73
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	Persen	--	--	--	--	--	100%

Pada tahun 2019 indikator sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD. Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan hasil review target indikator nilai PAD tahun 2020 turun menjadi Rp376 milyar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil perhitungan target PAD perubahan tahun 2020 dengan mendasarkan pada kondisi riil seperti adanya pandemi covid, kondisi ekonomi, dll maka target nilai PAD turun dari Rp571 milyar menjadi Rp376 milyar. Disamping itu adanya perubahan kelembagaan dan tupoksi pada tahun 2021 berimbas juga pada perubahan indikator untuk sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian meningkat dari nilai PAD menjadi indeks perekonomian pada tahun 2021 dan 2022.

Sasaran pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Daerah pada tahun 2022 sebagai bentuk perbaikan terhadap kinerja Setda. Dengan ditambahkannya sasaran ini indikator kinerja asisten menjadi lebih jelas dan terarah.

Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan capaian indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung diperoleh dari hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung.

Formula indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung:

$\Sigma$  Skor Kampung se-Kota Yogyakarta

$\Sigma$  Kampung se-Kota Yogyakarta

2. Perhitungan capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.
3. Indeks perekonomian diperoleh dari pembobotan tiga indikator program, yaitu persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian, dan persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik.

Formula indikator indeks perekonomian:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

- $\alpha$  : Kinerja Kebijakan perekonomian
- $\beta$  : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- $\lambda$  : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

4. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:

$$[70\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan} + 30\% \text{ Kinerja Layanan Pengadaan}]$$

❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:

$$1.) RK = \sum_{i-j} RO$$

RK = realisasi kegiatan

RO = realisasi output dari awal s.d akhir

$$RO_i = (roi \times BO_i) / 100$$

RO<sub>i</sub> = realisasi setiap output terhadap kegiatan (tertimbang)

roi = realisasi setiap output dalam %

$$BO_i = \frac{\text{anggaran output} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran output}}$$

BO<sub>i</sub> = bobot setiap output dalam %

2.)  $RD = \sum(RKi-j \times BKi-j)/100\%$

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BKi = \frac{\text{anggaran kegiatan} \times 100\%}{\sum i-j \text{ anggaran kegiatan}}$

$\sum i-j$  anggaran kegiatan

BD = bobot kegiatan dalam %

3.)  $RT = \sum(RDi-j \times BDi-j)/100\%$

RT = realisasi total

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BDi = \frac{\text{anggaran SKPD/unit kerja} \times 100\%}{\sum i-j \text{ anggaran SKPD/unit kerja}}$

$\sum i-j$  anggaran SKPD/unit kerja

BD = bobot SKPD/unit kerja dalam %

i = awal

j = akhir

❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:

$$\left[ \frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\%$$

5. Perhitungan capaian indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

6. Perhitungan capaian indikator persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah}}{\sum \text{Jumlah Indikator Sasaran Pemerintah Daerah}}$$

### 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Administrasi Tata Pemerintahan	1 Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2 Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitasi Keprotokolan
				2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penataan Organisasi	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		
		1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	81
6.	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.288.951.121	APBD TA 2022
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.931.742.713	APBD TA 2022
3.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 124.064.000	APBD TA 2022

4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 38.112.939.695 APBD TA 2022

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	81
6.	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.164.652.775	APBD-P TA 2022
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.764.131.718	APBD-P TA 2022
3.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 124.064.000	APBD-P TA 2022
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.362.508.762	APBD-P TA 2022

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

---

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2022 ada 4 program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 46.457.697.529, dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 46.333.633.529 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 124.064.000. Melalui mekanisme

perubahan APBD tahun 2022 jumlah anggaran naik menjadi Rp 50.415.357.255 dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 50.291.293.255 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 124.064.000.

2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah

**Tabel 2.6**  
**Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2022**

Uraian	Target		Persentase
<b>Belanja Operasi</b>		<b>Rp 47.876.498.955</b>	<b>94,96%</b>
- Belanja Pegawai	Rp 25.490.683.000		50,56%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 20.916.626.955		41,49%
- Belanja Hibah	Rp 1.469.189.000		2,91%
<b>Belanja Modal</b>		<b>Rp 2.538.858.300</b>	<b>5,04%</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.234.278.300		4,43%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 294.550.000		0,58%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 10.030.000		0,02%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp 50.415.357.255</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.7**  
**Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.362.508.762
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.737.040
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.794.880.287
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.014.946.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.874.204
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.264.381.314
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.525.344.300
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.193.248
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.989.176.140
	Kegiatan Penataan Organisasi	525.294.016
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.595.719.329
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.833.962.884
<b>2</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.164.652.775</b>
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.228.031.847
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.708.990.040
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.630.900.328
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	596.730.560
<b>3</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1.764.131.718</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	670.953.984
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	543.249.760
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	549.927.974
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	<b>124.064.000</b>
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	63.361.000
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	60.703.000
	<b>TOTAL</b>	<b>50.415.357.255</b>

### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Rp 3.347.639.258	6,64%	
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Rp 4.739.889.204	9,40%	
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Rp 1.880.535.524	3,73%	
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Rp 2.848.689.559	5,65%	
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Rp 12.107.920.710	24,02%	
6	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	0	0%	
7	Anggaran pendukung	Rp 25.490.683.000	50,56%	
	<b>Total</b>	<b>Rp 50.415.357.255</b>	<b>100%</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Indeks	40,59	42,19	103,94%
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	Indeks	69,73	73,05	104,77%
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	95,4	93,36	97,86%
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	81	81,4	100,49%
6.	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	Persen	100	102,45	102,45%

### 3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### 3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY. Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa skor EPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa skor EPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan skor antara Timda dan Timnas.

Realisasi indikator EKPPD tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Hal ini dikarenakan Kemendagri belum mengeluarkan Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbaru. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

$$\begin{aligned} \text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,2581 + 0,2 \\ &= 3,4581 \end{aligned}$$

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor  $3 < ST \leq 4$  artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor  $2 < T \leq 3$  artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor  $1 < S \leq 2$  artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor  $0 \leq R \leq 1$  artinya berprestasi Rendah (R).

Target EKPPD tahun 2022 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,4581. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), dengan demikian capaian nilai EKPPD tahun 2022 adalah 100%.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai EKPPD	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4581)	100%	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	100%

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)

Indikator nilai EKPPD sejak tahun 2017 selalu memperoleh predikat sangat tinggi dan hasil setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 nilai EKPPD meningkat 6,25% dibandingkan nilai EKPPD tahun 2017, artinya ada perbaikan – perbaikan yang telah dilakukan pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)			
			Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (3,4581)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai sejak tahun 2017. Namun demikian untuk target sasaran yang ditetapkan sejak tahun 2019 sudah merupakan target tertinggi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
- 3) Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Internal
  - a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
  - b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

2) Eksternal

- a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
- b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
- c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
- d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;
- e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD tahun 2022 telah tercapai dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan ini juga karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.739.889.204 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.422.198.152,91 atau 93,3%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 100% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 317.691.051,09 atau 6,7%.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima Piagam Penghargaan dari Kemendagri atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,4581 dan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan LPPD Tahun 2018. Namun demikian peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2018 belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penetapan peringkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir adalah untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-23 dari 93 daerah Kota secara nasional dengan skor 3,1733 (status: sangat

tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional**

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Kota Makasar	1	3,4404	ST
2	Kota Gorontalo	2	3,4142	ST
3	Kota Semarang	3	3,3775	ST
4	Kota Pekanbaru	4	3,3489	ST
5	Kota Tangerang	5	3,3314	ST
6	Kota Cimahi	6	3,3274	ST
7	Kota Madiun	7	3,3056	ST
8	Kota Banjar	8	3,3032	ST
9	Kota Surabaya	9	3,3029	ST
10	Kota Denpasar	10	3,3021	ST
11	Kota Bandung	11	3,3019	ST
12	Kota Depok	12	3,2858	ST
13	Kota Kediri	13	3,2769	ST
14	Kota Bontang	14	3,2742	ST
15	Kota Sukabumi	15	3,2637	ST
16	Kota Tasikmalaya	16	3,2622	ST
17	Kota Bekasi	17	3,2546	ST
18	Kota Samarinda	18	3,2297	ST
19	Kota Magelang	19	3,2214	ST
20	Kota Parepare	20	3,2175	ST
21	Kota Metro	21	3,2023	ST
22	Kota Probolinggo	22	3,2015	ST
<b>23</b>	<b>KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>23</b>	<b>3,1773</b>	<b>ST</b>
24	Kota Pontianak	24	3,1761	ST
25	Kota Bogor	25	3,1727	ST
26	Kota Padang	26	3,1723	ST
27	Kota Bukittinggi	27	3,1668	ST
28	Kota Bima	28	3,1652	ST
29	Kota Tangerang Selatan	29	3,1352	ST
30	Kota Payakumbuh	30	3,1338	ST
31	Kota Salatiga	31	3,1231	ST
32	Kota Cirebon	32	3,1177	ST
33	Kota Baubau	33	3,1113	ST
34	Kota Surakarta	34	3,0992	ST
35	Kota Pekalongan	35	3,0939	ST
36	Kota Balikpapan	36	3,0890	ST
37	Kota Batam	37	3,0857	ST

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
38	Kota Banjarmasin	38	3,0708	ST
39	Kota Banjarbaru	39	3,0546	ST
40	Kota Pangkalpinang	40	3,0546	ST
41	Kota Palopo	41	3,0493	ST
42	Kota Palembang	42	3,0427	ST
43	Kota Bitung	43	3,0384	ST
44	Kota Kupang	44	3,0363	ST
45	Kota Serang	45	3,0233	ST
46	Kota Tanjungpinang	46	3,0175	ST
47	Kota Sawahlunto	47	3,0139	ST
48	Kota Tidore Kepulauan	48	3,0123	ST
49	Kota Tebing Tinggi	49	3,0020	ST
50	Kota Tomohon	50	3,0007	ST
51	Kota Padang Panjang	51	2,9968	T
52	Kota Manado	52	2,9939	T
53	Kota Jambi	53	2,9893	T
54	Kota Kotamobagu	54	2,9865	T
55	Kota Solok	55	2,9809	T
56	Kota Banda Aceh	56	2,9673	T
57	Kota Prabumulih	57	2,9633	T
58	Kota Mataram	58	2,9623	T
59	Kota Jayapura	59	2,9601	T
60	Kota Palangka Raya	60	2,9338	T
61	Kota Palu	61	2,9253	T
62	Kota Binjai	62	2,8949	T
63	Kota Pariaman	63	2,8900	T
64	Kota Bandar Lampung	64	2,8870	T
65	Kota Dumai	65	2,8702	T
66	Kota Pagaram	66	2,8660	T
67	Kota Singkawang	67	2,8556	T
68	Kota Tarakan	68	2,8461	T
69	Kota Sungai Penuh	69	2,8413	T
70	Kota Tanjungbalai	70	2,8348	T
71	Kota Sabang	71	2,8128	T
72	Kota Ambon	72	2,8023	T
73	Kota Ternate	73	2,8011	T
74	Kota Blitar	74	2,8003	T
75	Kota Malang	75	2,7942	T
76	Kota Medan	76	2,7890	T
77	Kota Langsa	77	2,7856	T
78	Kota Pematang Siantar	78	2,7802	T
79	Kota Sibolga	79	2,7640	T
80	Kota Lubuklinggau	80	2,7623	T
81	Kota Sorong	81	2,7501	T

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
82	Kota Batu	82	2,7325	T
83	Kota Lhokseumawe	83	2,7246	T
84	Kota Tual	84	2,7043	T
85	Kota Gunungsitoli	85	2,6833	T
86	Kota Subulussalam	86	2,6809	T
87	Kota Padangsidempuan	87	2,6721	T
88	Kota Mojokerto	88	2,6615	T
89	Kota Cilegon	89	2,6284	T
90	Kota Pasuruan	90	2,6260	T
91	Kota Tegal	91	2,6052	T
92	Kota Bengkulu	92	2,0480	T
93	Kota Kendari	93	1,8027	S

### 3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat adalah indeks perekonomian yang diperoleh dengan formula:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

$\alpha$  : Kinerja Kebijakan perekonomian

$\beta$  : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

$\lambda$  : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

Realisasi tiga indikator program tahun 2022 adalah sebagai berikut: persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 99,49%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian adalah 55%, dan persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat adalah 81,16%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai:

$$= (45\% \times 55\%) + (35\% \times 81,16\%) + (20\% \times 99,49\%)$$

$$= 73,05$$

Pada tahun 2022 untuk indikator ini ditargetkan sebesar 69,73 sementara realisasinya sebesar 73,05. Tingkat capaian indikator indeks perekonomian sebesar:

$$= \text{realisasi indeks perekonomian} / \text{target indeks perekonomian} \times 100\%$$

$$= 73,05 / 69,73 \times 100\%$$

$$= 104,77\%$$

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Perekonomian Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Perekonomian	68	69,73	73,05	104,77%	69,73	104,77%

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,5%	1,85%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp553,6 milyar	--	--
		Indeks perekonomian	--	--	--	--	68	73,05

Indikator nilai PAD adalah hasil review KemenPAN atas SAKIP tahun 2018 sehingga indikator ini baru direalisasikan tahun 2019. Oleh karena itu realisasi indikator ini pada tahun 2017 dan 2018 belum ada. Pada tahun 2017 dan 2018 sasaran ini masih menggunakan indikator persentase peningkatan PAD. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.8 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--
		Indeks Perekonomian	--	--	--	--	64,62	69,73
			<b>Realisasi</b>					
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,50%	1,85%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp553,6 milyar	--	--
		Indeks Perekonomian	--	--	--	--	68	73,05

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari stakeholder internal dan eksternal Pemkot Yogyakarta.
- 2) Ada TPAKD, TP2DD, TPID, KUR, pemantauan harga, program kerja dan roadmap.
- 3) Instrumen untuk penilaian kinerja ditambahkan untuk puskesmas, Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha.
- 4) Adanya desk evaluasi BLUD setiap bulan dan adanya desk evaluasi BUMD setiap tribulan.
- 5) Meningkatnya jumlah usulan kerjasama yang difasilitasi dan ada kebutuhan melakukan kerjasama sesuai arahan dari pemerintah pusat.
- 6) OPD dan pihak luar sudah teredukasi dengan baik tentang mekanisme kerjasama daerah melalui Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang sudah diimplementasikan.
- 7) OPD dan pihak luar mendapat fasilitasi yang optimum.
- 8) Tambahan CPNS membuat fasilitasi kerjasama daerah menjadi makin cepat.

Faktor penghambat dalam pencapaian indeks perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.
- 2) Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap.
- 3) Beberapa OPD dan calon mitra belum dapat menstrukturkan dan mengusulkan kerja sama dengan sistematis.
- 4) Beberapa produk pengetahuan masih dalam tahap konsep atau pengembangan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator indeks perekonomian tahun 2022 telah tercapai dengan capaian sebesar 104,77%. Salah satu penyebab keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perekonomian dan pembangunan. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.880.535.524 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.845.884.273 atau 98,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 104,77% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 34.651.251 atau 1,84%. Hal utama lain yang menyebabkan capaian di atas 100% adalah karena meningkatnya jumlah usulan kerjasama yang difasilitasi dan OPD maupun pihak luar sudah teredukasi dengan baik tentang mekanisme kerjasama daerah melalui Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang sudah diimplementasikan.

### 3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan. Indikator ini merupakan gabungan indikator program persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator program persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator program persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan, yang diperoleh dengan formula:

( 30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan )

$$\left[ \frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% + \frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% + \left[ \sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\% \right]$$

Realisasi persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu: 64,56%

Realisasi persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan: 98,2%

Realisasi persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan: 99,93%

$$= ((64,56\% \times 60\% + 98,2\% \times 40\%) \times 30\%) + (99,93\% \times 70\%)$$

$$= 23,4 + 69,95$$

$$= 93,36$$

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,4 sementara realisasinya sebesar 93,36.

Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\%$$

$$= 93,36 / 95,4 \times 100\%$$

$$= 97,86\%$$

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelaksanaan pembangunan	95,15	95,4	93,36	97,86%	95,4	97,86%

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks pelaksanaan pembangunan	90,65	94,67	94,48	94,77	95,15	93,36

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	85,0	88,3	93,4	94,3	95,4
			Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			90,65	94,67	94,48	94,77	95,15	93,36

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antar sub koordinator yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi/desk capaian realisasi fisik dan keuangan.
- 3) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan.
- 4) Realisasi fisik digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
- 5) Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik dan apabila tidak dilaksanakan akan menambah beban kinerja yang menumpuk.
- 6) Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan.
- 7) Mengembangkan aplikasi SIMPel terkait pengintegrasian menu laporan kontrak dengan data SIRUP, tampilan geografis, dan memberikan akses kepada pengawas pekerjaan untuk update progres pekerjaan.
- 8) Menggunakan aplikasi Whatsapp untuk mempermudah dalam berkomunikasi;
- 9) Menggunakan aplikasi Zoom untuk mempermudah dalam berkoordinasi.
- 10) Memanfaatkan *early warning system* sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik.
- 11) Melaksanakan pengendalian pembangunan yang meliputi monitoring progres perkembangan pekerjaan melalui laporan kontrak, desk laporan kontrak, dan peninjauan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 12) Menyusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota yogyakarta nomor 117 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota yogyakarta yang membahas secara detail tentang dokumen pengadaan sesuai dengan jenis pengadaannya.
- 13) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi dokumen pemilihan yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender.
- 14) Menciptakan inovasi BINA BARJAS di Bagian PBJ yang memudahkan pelaku pengadaan barang dan jasa dalam memahami peraturan terbaru dan permasalahan yang sedang dihadapi beserta solusinya.

- 15) Melakukan pengembangan sistem aplikasi SIAP yang awalnya aplikasi tersebut hanya digunakan di internal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Namun untuk ke depan akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi sehingga dalam SIAP dapat diketahui proses tender dari awal pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Ada kegiatan yang memerlukan pekerjaan secara detail dan perlu sinkronisasi dengan peraturan yang baru sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama karena peraturan yang disusun perlu diharmonisasi oleh instansi vertikal.
- 2) Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan.
- 3) Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP.
- 4) Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke Bagian PBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP.
- 5) Apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 tidak tercapai dengan capaian hanya sebesar 97,86%. Hal ini disebabkan karena salah satu indikator program yaitu realisasi persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu yang menjadi salah satu komponen pembentuk indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat tidak mencapai target. Target tahun 2022 sebesar 88% hanya tercapai 64,56%. Indikator ini berkaitan dengan ketepatan waktu pengadaan tender berdasarkan jadwal yang telah dimasukkan dalam aplikasi SIRUP. Selama tahun 2022 ada 51 paket tender yang waktu pengadaannya tepat waktu dari total 79 paket tender. Sebanyak 28 paket tender waktu pelaksanaannya tidak tepat waktu. Hal ini ada 2 penyebab, yaitu OPD terkait tidak segera menindaklanjuti dengan memperbaiki kesalahan dalam dokumen pemilihan sehingga membutuhkan

perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia dan masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke Bagian PBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP. Dalam pelaksanaan tender Bagian PBJ sudah berkoordinasi dan menghubungi personil terkait apabila ada koreksi dalam dokumen pemilihan maupun pemaketan di aplikasi SIRUP, namun hal ini tentunya perlu ada respon yang cepat dari pihak OPD terkait.

Dari sisi penyerapan anggaran, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat sebesar Rp 2.848.689.559 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.754.291.419,68 atau 96,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 93,2% maka ada peningkatan penyerapan sebesar 3,49%.

### 3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat adalah Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh dengan formula:

Formula indeks pelayanan publik:

$$= \frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

**Tabel 3.13**  
**Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022**

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	68	5.498,5
2	Kecamatan	52	4.231,77
3	Puskesmas	33	2.649,04
4	TK dan SD	205	16.793,07
	<b>TOTAL</b>	<b>358</b>	<b>29.172,38</b>

$$= (5.498,50 + 4.213,77 + 2.649,04 + 16.793,07)/358$$

$$= 81,4$$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 81 tercapai 81,4.

Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\%$$

$$= 81,4 / 81 \times 100\%$$

$$= 100,49\%$$

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelayanan publik	80,69	81	81,4	100,49%	81	100,49%

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	80,45	80,69	81,4

Realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2022 menggunakan data realisasi pada tahun 2021 hal ini karena berdasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/46/PP.06/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik menyatakan di dalam isi surat tersebut untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang harus disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan antara realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2022 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2,04%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00
			Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			79,77	80,21	80,45	80,45	80,69	81,4

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya.
- 2) Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- 3) Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki standar pelayanan yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Sinergitas dan koordinasi pengguna layanan terhadap peralihan layanan belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran capaian indikator indeks pelayanan publik tahun 2022 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,49%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut juga ditunjang dengan program, kegiatan dan anggaran yang memadai. Ada dua program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, yaitu program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan penataan organisasi sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan

administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut (tidak termasuk gaji ASN, gaji Kepda, dan BPO Kepda) sebesar Rp 12.107.920.710 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.690.117.117,4 atau 96,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 100,49% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 417.803.592,6 atau 3,45%.

### 3.2.5 Sasaran Strategis Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan

Pada tahun 2017 – 2020 indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung merupakan salah satu indikator kinerja sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana per tahun 2021). Mulai tahun 2021 indikator ini dipindah ke Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan baru. Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor Kampung se-Kota Yogyakarta}}{\sum \text{Kampung se-Kota Yogyakarta}}$$

Jumlah skor kampung seKota Yogyakarta tahun 2022 adalah 71,3 dengan total kampung seKota Yogyakarta ada 169 kampung. Sehingga diperoleh hasil:

$$= (71,3 / 169) \times 100$$

$$= 42,19$$

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 40,59 sementara realisasinya sebesar 42,19. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPMBK} / \text{target IPMBK} \times 100\%$$

$$= 42,19 / 40,59 \times 100\%$$

$$= 103,94\%$$

**Tabel 3.17**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkat Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	41,49	40,59	42,19	103,94%	40,59	103,94%

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	Indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	28,81	38,98	39,82	40,59	41,49	42,19

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	26,15	27,00	28,00	29,00	40,59	40,59
			Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			28,81	38,98	39,82	40,59	41,49	42,19

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Semangat masyarakat dalam membangun kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum tidak ada hambatan yang berarti, hanya perlu koordinasi yang lebih intens dan perlu pembinaan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung pada tahun 2022 telah tercapai dengan capaian sebesar 103,94%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk mencapai target sasaran tersebut sebesar Rp 3.347.639.258 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.286.883.745,8 atau 98,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 103,94% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 60.755.512 atau 1,81%.

### 3.2.6 Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Dengan Target

Formula indikator ini adalah persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan. Ada 13 sasaran strategis dan 16 indikator sasaran strategis sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran strategis, indikator sasaran, target sasaran, realisasi sasaran, dan capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.20.

**Tabel 3.20**  
**Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,1%	7,68% - 6,32%	6,62%	113,80%
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	58,34	65	70,15	107,92%
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	86	95,1	95,3	100,21%
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	0,395	0,382 – 0,464	0,449	100%
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,23%	4,2% - 5,5%	4,52%	100%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas	1.500	600	698	83,67%
		Jumlah pelanggaran perda	5.000	4.200	3.815	109,17%

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,45 th	11,72 th	11,89 th	101,45%
		Angka harapan lama sekolah	17,33 th	17,6 th	17,61 th	100,06%
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,4 th	74,76 th	74,83 th	100,09%
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya masyarakat	Persentase rintisan Kelurahan budaya yang aktif	72%	72%	80,65%	112,01%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,5%	79,84% - 82,5%	82,53%	100,04%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	51,64	55,65	60,89	109,42%
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	44,41	45,28	45,91	101,39%
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A	A	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan diperoleh dari menjumlah semua capaian indikator dibagi dengan jumlah indikator, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Total capaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta =

$$113,8\% + 107,92\% + 100,21\% + 100\% + 100\% + 83,67\% + 109,17\% + 101,45\% + 100,06\% + 100,09\% + 112,01\% + 100,04\% + 109,42\% + 101,39\% + 100\% + 100\% = 1.639,23\%$$

Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan =  $1.639,23\% / 16$

$$= 102,45\%$$

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% sementara realisasinya sebesar 102,45%. Tingkat capaian indikator persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan:

$$= \text{realisasi capaian strategis} / \text{target sasaran strategis} \times 100\%$$

$$= 102,45\% / 100\% \times 100\%$$

$$= 102,45\%$$

**Tabel 3.21**

**Target dan Realisasi Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2022 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	--	100%	102,45%	102,45%	100%	102,45%

**Tabel 3.22**

**Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Dengan Target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	--	--	--	--	--	102,45 %

**Tabel 3.23**

**Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Sesuai Dengan Target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	--	--	--	--	--	100%
			Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			--	--	--	--	--	102,45%

Sasaran ini baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Daerah pada tahun 2022 sebagai bentuk perbaikan terhadap kinerja Setda. Dengan ditambahkannya sasaran ini indikator kinerja asisten menjadi lebih jelas dan terarah.

### 3.2.7 Realisasi Program Sekretariat Daerah

Capaian program Sekretariat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.24.

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2022**

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	85,03%	100,04%
		Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1,14%	1,31%	114,91%
		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	85%	90%	105,88%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai $\geq 351$ )	Cepat Berkembang (nilai 388,33)	100%
		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%
		Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%	99,49%	114,81%
2	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%	55%	100%
		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	81,16%	102,75%
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5%	99,93%	101,45%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	64,56%	73,36%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%	98,2%	111,59%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	100%	100%
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)	A (Nilai 88,8)	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	81,41	100,51%

Indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif tercapai 85,03%. Realisasi tersebut diperoleh dari data jumlah kelembagaan yang aktif sebanyak 10.146 dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada sebanyak 11.932.

Indikator persentase peningkatan swadaya masyarakat tercapai 1,31%. Realisasi tersebut diperoleh dengan formula:

*(jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan – jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya) / jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya.*

Data jumlah anggaran swadaya murni masyarakat tahun berjalan sebesar Rp 44.606.148.664 dan data jumlah anggaran swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya sebesar Rp 44.027.390.800.

Indikator persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi tercapai 90%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 27 urusan wajib dan pilihan yang memperoleh kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total 30 urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib yang belum mencapai kategori tinggi/sangat tinggi adalah: 1.) kepemudaan dan olah raga (sedang) karena indikator rasio lapangan dan gelanggang olah raga per 1000 penduduk di Kota Yogyakarta rendah. Hal ini disebabkan wilayah Kota Yogyakarta yang sempit dan padat sehingga jumlah lapangan dan gelanggang olah raga hanya sedikit. 2.) penanaman modal (rendah) karena jumlah nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta hanya sedikit. Urusan pilihan yang belum mencapai kategori tinggi/sangat tinggi adalah perdagangan (sedang) karena indikator kontribusi sektor perdagangan hanya mendapatkan skor sedang dan indikator ekspor bersih perdagangan mendapatkan skor rendah. Hal ini disebabkan karena penggerak utama roda ekonomi Kota Yogyakarta adalah sektor pariwisata dan turunannya seperti jasa perhotelan, travel dan restoran.

---

Indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah tercapai nilai 388,33 (cepat berkembang). Realisasi tersebut diperoleh dari total nilai evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 17.475 dibagi 45 kelurahan. Indikator ini untuk mengukur tingkat perkembangan kelurahan berdasarkan evaluasi dari kegiatan di kelurahan tahun 2021 yang mencakup bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Dari 45 kelurahan semuanya sudah masuk kategori cepat berkembang.

Indikator persentase harmonisasi produk hukum daerah tercapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari data total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang telah diharmonisasi dibagi dengan total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang ditetapkan. Jumlah masing-masing produk hukum tersebut yang telah diharmonisasi dan ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perda ada 13 Perda;
2. Jumlah Perwal ada 84 Perwal; dan
3. Jumlah Kepwal ada 487 Kepwal.

Indikator persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti tercapai 99,49%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 196 kerjasama dibagi total kerjasama 197.

Indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian tercapai 55%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah kebijakan perekonomian yang direalisasikan sebanyak 11 kebijakan dibagi total kebijakan perekonomian sebanyak 20 kebijakan. Tambahan kebijakan baru yang direalisasikan di tahun 2022 adalah rancangan kebijakan tentang peta jalan pengembangan ekonomi kreatif.

Indikator persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik tercapai 81,16%. Realisasi tersebut diperoleh dari persentase rata-rata jumlah BUMD dan BLUD yang masuk kategori baik. Jumlah BUMD masuk kategori baik sebanyak 2 BUMD dari total 3 BUMD. BUMD yang belum masuk kategori baik adalah Perseroda Jogjatama Vishesha karena dari hasil penilaian kinerja laporan laba rugi belum memperoleh profit. Jumlah BLUD masuk kategori baik sebanyak 22 BLUD dari total 23 BLUD. BLUD yang belum baik adalah Puskesmas Jetis karena dari hasil penilaian kinerja belum berhasil mencapai target pendapatan.

Indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan per tanggal 4 Januari 2023 tercapai 99,93%. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi output kegiatan

semua OPD/Unit Kerja dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai anggaran. Deviasi output kegiatan sebesar 0,07% disebabkan oleh:

1. Kegiatan pemutakhiran data objek PBB karena objek pajak sulit ditemui dan pada saat ditemui persyaratan yang diberikan cukup sulit (BKPAD).
2. Kegiatan rekomendasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten tidak mencapai target karena jumlah berkas permohonan yang diterima sedikit dan dari hasil verifikasi berkas permohonan rekomendasi banyak yang tidak lengkap. Disamping itu saat peninjauan ke lapangan ada beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan berkas permohonan yang diajukan (Dispertaru).
3. Pengadaan tanah untuk pengembangan RSUD Kota Yogyakarta gagal karena tidak ada kesepakatan harga (Dispertaru).
4. Kegiatan kunjungan masyarakat di triwulan I – III tahun 2022 belum bisa dilaksanakan karena masih berlakunya PPKM (Dinkes).
5. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan karena berdasarkan SE Kemenkes Nomor 652 Tahun 2022 menyatakan bahwa akreditasi dilaksanakan tahun 2023 (Dinkes).
6. Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli tidak dibentuk karena belum diperlukan input dari pakar (Setwan).
7. Pekerjaan rehabilitasi talud Sungai Winongo putus kontrak dikarenakan faktor alam dan kondisi lapangan yang menyulitkan pengecoran (DPUPKP).
8. Pengadaan pakaian dinas Linmas tidak dilaksanakan karena ada surat dari Kemendagri yang mengarahkan untuk menunda pengadaan sampai ada Permendagri baru yang mengatur tentang pakaian dinas Linmas (SatpolPP).

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercapai 88,8 (A). Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian 5 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Masing-masing komponen memperoleh poin sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin 29,45;
2. Pengukuran kinerja memperoleh poin 22,19;
3. Pelaporan kinerja memperoleh poin 14,10;
4. Evaluasi internal memperoleh poin 7,56; dan
5. Capaian kinerja memperoleh poin 15,50.

---

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu tercapai 64,56%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 51 paket tender yang tepat waktu dibagi dengan total 79 paket tender. Sebanyak 28 paket tender waktu pelaksanaannya tidak tepat waktu. Hal ini ada 2 penyebab, yaitu OPD terkait tidak segera menindaklanjuti dengan memperbaiki kesalahan dalam dokumen pemilihan sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia dan masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke Bagian PBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP. Dalam pelaksanaan tender Bagian PBJ sudah berkoordinasi dan menghubungi personil terkait apabila ada koreksi dalam dokumen pemilihan maupun pemaketan di aplikasi SIRUP, namun hal ini tentunya perlu ada respon yang cepat dari pihak OPD terkait.

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan tercapai 98,2%. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 164 responden internal dan eksternal yang puas terhadap pelayanan pengadaan dibagi total 167 responden internal dan eksternal. Sasaran responden internal adalah 41 OPD dan sasaran responden eksternal adalah penyedia yang menggunakan fasilitas LPSE dan yang melakukan proses klarifikasi dengan target responden 150 orang.

Indikator persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi tercapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 41 OPD/Unit Kerja yang telah memenuhi ketepatan terhadap susunan organisasi, tupoksi, beban kerja, dan ketatalaksanaan dibagi total 41 OPD/Unit Kerja. Dalam mewujudkan tercapainya target sasaran program, telah dilaksanakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Evaluasi kelembagaan dilaksanakan meliputi evaluasi struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja. Bersamaan dengan itu, telah dilaksanakan evaluasi analisa jabatan pada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan.

Indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum dan keprotokolan tercapai 81,41 (masuk kategori: baik). Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 10 unsur pelayanan oleh 152 responden dengan menggunakan skala likert. Target reponden adalah tamu dan masyarakat yang memanfaatkan layanan Bagian Umum Protokol (eksternal) serta 41 OPD (internal). Sepuluh unsur pelayanan dan hasil nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan prosedur pelayanan (3,072)
2. Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan (2,993)

3. Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pelayanan ((2,980)
4. Perilaku pegawai (3,007)
5. Kedisiplinan pegawai (3,013)
6. Kejelasan dan kepastian (2,928)
7. Keadilan mendapatkan pelayanan (2,993)
8. Kenyamanan lingkungan (2,934)
9. Ketersediaan sarpras (2,928)
10. Pelayanan fasilitasi peminjaman tempat (2,757)

### 3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran termasuk belanja gaji dan belanja operasional kepala daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 47.377.572.722,19 atau 93,97%. Sedangkan penyerapan anggaran tanpa belanja gaji dan dan belanja operasional kepala daerah sebesar Rp 23.999.374.708,79 atau 91,71%. Penyerapan anggaran terbesar pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 96,73% sedangkan penyerapan terkecil pada program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebesar 86,4%. Secara rinci realisasi anggaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.25 dan Tabel 3.26.

**Tabel 3.25**  
**Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Belanja Operasional Kepala Daerah Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan ASN	24.478.137.000	22.401.352.989	91,52
2	Gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	140.546.000	105.174.070	74,83
3	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	872.000.000	871.670.954	99,96

**Tabel 3.26**  
**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.871.825.762	16.319.445.718	96,73
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.737.040	80.056.940	97,94
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	316.743.287	315.109.765	99,48
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.400.000	2.319.317	96,64

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.874.204	143.194.065	99,53
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.264.381.314	3.218.764.718	98,60
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.525.344.300	1.449.771.020	95,05
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.193.248	550.321.045	97,71
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.989.176.140	1.901.038.362	95,57
	Kegiatan Penataan Organisasi	525.294.016	515.002.576	98,04
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.595.719.329	5.370.641.076	95,98
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.833.962.884	2.743.226.834	96,80
<b>2</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.164.652.775</b>	<b>5.830.051.445</b>	<b>94,57</b>
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.228.031.847	1.125.472.731	91,65
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.708.990.040	2.666.597.518	98,44
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.630.900.328	1.458.800.408	89,45
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	596.730.560	579.180.788	97,06
<b>3</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1.764.131.718</b>	<b>1.742.684.857</b>	<b>98,78</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	670.953.984	664.820.817	99,09
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	543.249.760	534.799.150	98,44
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	549.927.974	543.064.890	98,75
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	<b>124.064.000</b>	<b>107.192.689</b>	<b>86,40</b>
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	63.361.000	50.800.160	80,18
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	60.703.000	56.392.529	92,90
	<b>TOTAL</b>	<b>24.924.674.255</b>	<b>23.999.374.709</b>	<b>96,29</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.27.

**Tabel 3.27**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59	42,19	103,94	3.347.639.258	3.286.883.746	98,19
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100	4.739.889.204	4.422.198.153	93,30
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73	73,05	104,77	1.880.535.524	1.845.884.273	98,16
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4	93,36	97,86	2.848.689.559	2.754.291.420	96,69
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	81	81,4	100,49	12.107.920.710	11.690.117.117	96,55
6	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	100%	102,45%	102,45	0	0	0
Total belanja kegiatan						24.924.674.255	23.999.374.709	96,29
Total belanja gaji dan operasional kepala daerah						25.490.683.000	23.378.198.013	91,71

**Tabel 3.28**  
**Analisis Efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	103,94	98,19	1,81
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	100	93,30	6,70
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	104,77	98,16	1,84
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	97,86	96,69	0,00
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	100,49	96,55	3,45
6	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	102,45	0	0

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Sekretariat Daerah kerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan kecuali sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat dan sisa anggaran yang terjadi karena telah melakukan efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat terealisasi sebesar 103,94% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 60.755.512.
2. Capaian sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat terealisasi sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 317.691.051.
3. Capaian sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat terealisasi sebesar 104,77% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 34.651.251.
4. Capaian sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat terealisasi sebesar 97,86% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 0.
5. Capaian sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat terealisasi sebesar 100,49% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 417.803.593.

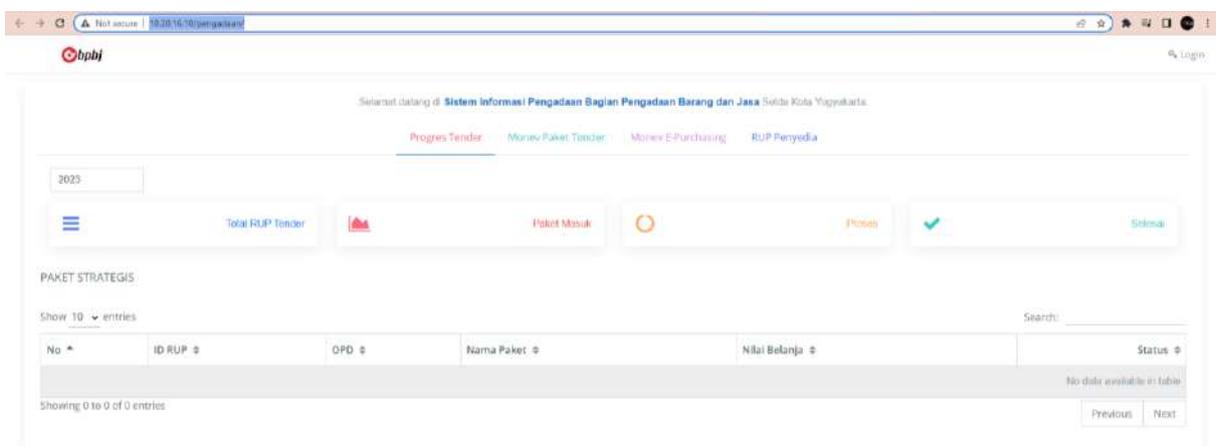
6. Tidak ada anggaran khusus untuk sasaran pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target.

### 3.4 Inovasi

Inovasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

Salah satu ketugasan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik. Maka untuk mempermudah pelaksanaan tugas tersebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membuat inovasi berupa aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengadaan). Aplikasi SIAP berisi data proses pengadaan mulai dari entri SiRUP, proses persiapan, proses pemilihan, proses pelaksanaan tender, dan juga mencakup data vendor. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam melaksanakan proses tender. Perbedaan aplikasi SIAP dengan aplikasi dari LPSE adalah dalam aplikasi SIAP dapat diketahui dari awal proses tender sampai dengan pelaksanaan kontrak sehingga pemantauan dalam proses tender pun lebih dimudahkan dalam aplikasi SIAP.

**Gambar 3.1**  
**Tampilan Halaman Utama Aplikasi SIAP**



**Gambar 3.2**  
**Tampilan Menu Progres Tender Aplikasi SIAP**

No.	ID RUP	ORG	Nama Paket	Nilai Berapa	Status
1	30291543	DIKAS PERENCANAAN KOPERASIS USHAH KECIL DAN MENENGAH	Pembelian Bahan Baku, Serbuk, Serbuk HM, SIAO, Resensi, Dukung KPT, Logam	5.500.000.000	OK
2	30291556	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembangunan SD Ragen Pakel	4.000.000.000	OK
3	31171938	DIKAS PERENCANAAN KOPERASIS USHAH KECIL DAN MENENGAH	Pembangunan Dukung PDR (DAK)	41.040.801.000	OK
4	30291115	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembelian Bahan Jasa Meyei Sudyatno (DAK Penangan)	3.750.000.000	OK
5	30291621	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembelian Bahan Jasa Di Sempangpang	3.450.375.000	OK
6	30291724	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembelian Lapangan Perumahan Kampung Karang Kel. Pringsel	3.400.000.000	OK
7	30291918	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembelian dan Pengaspalan Lapangan Perumahan Kuruk Kampung Bantoro, Kalerhar Pringsel	2.400.000.000	OK
8	30291828	DIKAS REHABILITASI	Pembangunan Btu Baby Lakarsari	1.800.000.000	OK
9	30291937	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembelian Jasa Demok	10.900.000.000	OK
10	30291643	DIKAS PERENCANAAN USUJUH PERUBAHAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	Pembangunan Dukung Pemasok dan Instalasi SD	10.000.000.000	OK

**Gambar 3.3**  
**Tampilan Menu Monev Paket Tender Aplikasi SIAP**

No.	ID RUP	Nama Paket	Page	Nilai Kontrak	Nama PB	Status
1	30277321	Jasa Revisi/Revisi Kurat, Revisi dan Konsultasi	305.147.000	400.200.000	PT. BAWANG INDRAMATI	OK
2	30699819	Beberapa jasa kesehatan dinas	800.000.000	988.246.000	PT. SARAHARAHMANU CIPITA KAPPA	OK
3	30662467	Beberapa Jasa Berupa Revisi/Revisi (Berupa Cleaning Service Kesehatan dan Kalkulasi)	300.000.000	301.777.379	PT. EKA-RECHERIT MULTASARANA	OK
4	35491737	Pembangunan SDH Srotol	330.430.000	354.001.750	CV. Lestari Jaya	OK
5	35491783	Konstruksi Satek Sotega (Prongka Kel. Pengapusan)	300.000.000	776.300.000	CV. PARIGARA JAYA SEKELITA	OK
6	35491829	Pembangunan Tegal Dugal Wiyono Kel. Tegayoh	300.000.000	706.201.441	CV. Perseja	OK
7	35491839	Pembangunan SDH A. Weyung	1.500.000.000	1.112.000.000	CV. Lestari Cakrawala Jaya	OK
8	35241194	Pembelian Lapangan Perumahan Kampung Karang Kel. Pringsel	2.400.000.000	1.777.540.500	CV. Lestari Cakrawala Jaya	OK
9	35241414	Pembelian dan Pengaspalan Lapangan Perumahan Kuruk Kampung Bantoro, Kalerhar Pringsel	2.400.000.000	1.957.000.400	CV. Lestari Cakrawala Jaya	OK
10	30601059	Pembangunan SD Ragen Pakel	4.000.000.000	3.786.000.000	CV. PUTERA SUPRI	OK

Inovasi Bagian Organisasi:

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, dilaksanakan inovasi untuk mempermudah dalam melaksanakan ketugasan. Inovasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Jogja Corporate University: *transfer knowledge* antar pegawai dengan metode modern untuk pemenuhan kebutuhan diklat pegawai di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Mini Corpu Bagian Organisasi: *transfer knowledge* antar pegawai dengan metode modern untuk meningkatkan kompetensi pegawai Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. CMC (Coaching, Mentoring, and Consulting): *transfer knowledge*, bimbingan dan konsultasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta terkait dengan gambaran tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta sehingga mempermudah dalam melaksanakan ketugasan.

---

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022. Hasil dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* dalam perencanaan periode berikutnya.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, nilai EKPPD, indeks perekonomian, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Satu indikator sasaran yaitu indeks pelaksanaan pembangunan tidak tercapai.
3. Anggaran yang berhasil diefisiensi (tidak termasuk gaji dan operasional kepala daerah) sebesar Rp 830.901.407 atau 3,33%.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung adalah:
  - a. Semangat masyarakat dalam membangun kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait.
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
  - a. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
  - c. Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks perekonomian adalah:
  - a. Adanya dukungan dari stakeholder internal dan eksternal Pemkot Yogyakarta.
  - b. Ada TPAKD, TP2DD, TPID, KUR, pemantauan harga, program kerja dan roadmap.
  - c. Instrumen untuk penilaian kinerja ditambahkan untuk puskesmas, Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha.
  - d. Adanya desk evaluasi BLUD setiap bulan dan adanya desk evaluasi BUMD setiap tribulan.

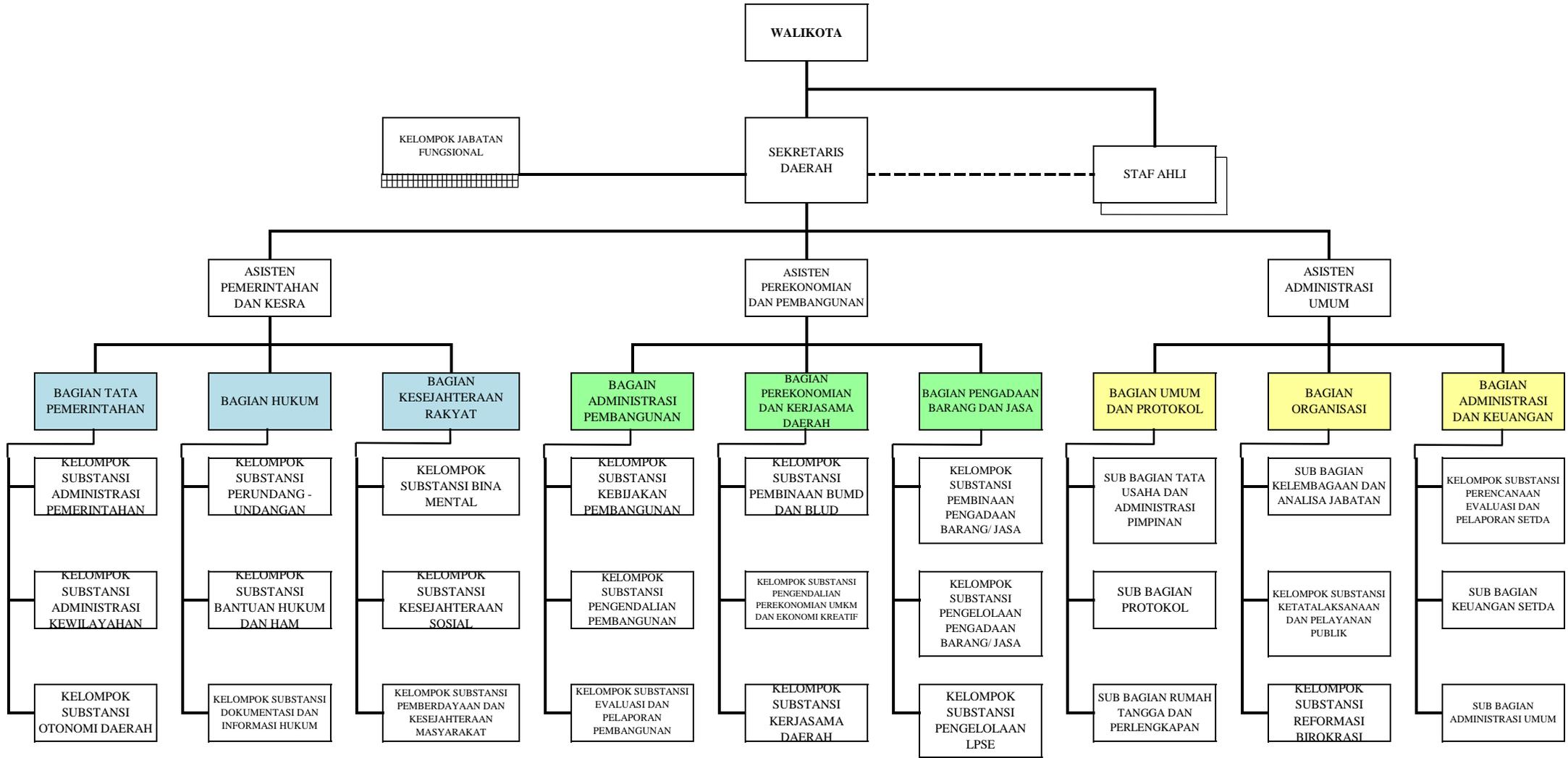
- 
- e. Meningkatnya jumlah usulan kerjasama yang difasilitasi dan ada kebutuhan melakukan kerjasama sesuai arahan dari pemerintah pusat.
  - f. OPD dan pihak luar sudah teredukasi dengan baik tentang mekanisme kerjasama daerah melalui Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang sudah diimplementasikan
  - g. OPD dan pihak luar mendapat fasilitasi yang optimum.
  - h. Tambahan CPNS membuat fasilitasi kerjasama daerah menjadi makin cepat.
7. Faktor penghambat utama tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
- a. OPD terkait tidak segera menindaklanjuti dengan memperbaiki kesalahan dalam dokumen pemilihan sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia; dan
  - b. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke Bagian PBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP.
8. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
- a. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya.
  - b. Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
  - c. Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki standar pelayanan yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

# LAMPIRAN

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan  
MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih</b>										
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kamune	Hasil skoring deklarasi keberdayaan kamune	26,15	27	28	29	40,59	40,59	40,59
Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)				
Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani	xxx	xxx	xxx	xxx	64,62	69,73	80,22
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4	95,4
Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan Internal	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00

Program PD		Sasaran Program PD		Indikator Program PD		Formula Indikator Program PD	Target Program PD					
2017-2020	2021-2022	Lama	Baru	Lama	Baru		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Keaktifan lembaga masyarakat meningkat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif		(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%	xxx	xxx	82%	83%	84,89%	85,00%
			Swadaya masyarakat meningkat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat		(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%	1%	1%	1%	1%	1,16%	1,14%
Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan		Perkembangan pembangunan wilayah meningkat		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah		Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)
		Penyelenggaraan tata pemerintahan meningkat	Kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan meningkat	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi		Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / Jumlah urusan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti x 100%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan		Harmonisasi produk hukum daerah meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah		Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama		Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti meningkat			Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama x 100%	xxx	xxx	xxx	xxx	80%	86,66%
	Perekonomian dan Pembangunan		Kebijakan perekonomian yang direalisasikan meningkat		Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	xxx	xxx	xxx	xxx	50%	55%
		BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat			Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD	xxx	xxx	xxx	xxx	74,64%	78,99%
Pelayanan Pengadaan Barang/jasa		Pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa meningkat		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu		Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%	70,0%	60,0%	75,0%	82,5%	85,0%	88,0%
				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan		Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%	70,0%	72,5%	75,0%	82,5%	85,0%	88,0%



**MATRIKS TINDAK LANJUT PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021**

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
1	Evaluasi Internal	dokumentasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya perlu ditingkatkan	meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindaklanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya	Pengukuran kinerja selain ada kolom keterangan yang menjelaskan perkembangan capaian juga ditambah dengan kolom faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian sasaran	Format pengukuran kinerja yang disertai faktor pendorong dan penghambat
2	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	kinerja output maupun outcome telah mencapai target yang ditetapkan meskipun belum mencapai bobot maksimal	meningkatkan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan pengukuran kinerja dan monev rencana aksi setiap triwulan	Dokumen pengukuran kinerja setda dan monev rencana aksi setda triwulanan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫ  
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦠꦤꦶꦪꦏꦠꦫ

Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332  
EMAIL : setda@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI  
Jabatan : Walikota Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 06 JAN 2022

Pihak Kedua  
  
H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama  
  
Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP. 196512131992031006

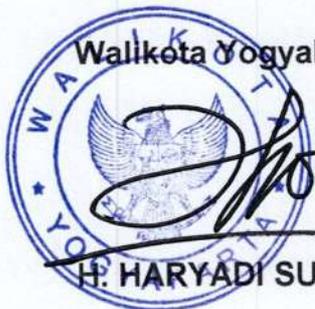
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	81
6.	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target.	Prosentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	100%

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Kependagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran	Keterangan
1.	Program penyelenggaraan tata pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 6.288.951.121	APBD TA 2022
2.	Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum			
3.	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama			
4.	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.931.742.713	APBD TA 2022
5.	Program pelayanan pengadaan barang/jasa			
6.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp 124.064.000	APBD TA 2022
7.	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp38.112.939.695	APBD TA 2022
8.	Program pelayanan kedinasan			

	kepala daerah, wakil kepala daerah sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokoloan pemerintah daerah		
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
<b>Jumlah Anggaran</b>			Rp46.457.697.529

Yogyakarta, 06 JAN 2022


  
 Walikota Yogyakarta
   

  
 H. HARYADI SUYUTI


  
 Sekretaris Daerah
   
 Kota Yogyakarta
   

  
 Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
   
 NIP. 196512131992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫ  
ꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦫꦶꦠꦠꦤꦶꦪꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332 EMAIL [setda@jogjakota.go.id](mailto:setda@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUMADI, S.H., M.H.  
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 17 OCT 2022

Pihak Kedua  
  
SUMADI, S.H., M.H.  
NIP. 196308261989031007

Pihak Pertama  
  
IR. AMAN YURIADIJAYA  
NIP. 196512131992031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	81
6.	Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai target yang telah ditetapkan	100%

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran Perubahan 2022	Keterangan
1.	Program penyelenggaraan tata pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp6.164.652.775	APBD PERUBAHAN TA 2022
2.	Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum			
3.	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama			
4.	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp1.764.131.718	APBD PERUBAHAN TA 2022
5.	Program pelayanan pengadaan barang/jasa			

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran Perubahan 2022	Keterangan
6.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp124.064.000	APBD PERUBAHAN TA 2022
7.	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp42.362.508.762	APBD PERUBAHAN TA 2022
8.	Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah			
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
<b>Jumlah Anggaran</b>			Rp50.415.357.255	

Yogyakarta, 17 OCT 2022

Pj. Walikota Yogyakarta  
  
**SUMADI, S.H., M.H.**  
 NIP. 196308261989031007

Sekretaris Daerah  
 Kota Yogyakarta  
  
**H. AMAN YURIADIJAYA**  
 NIP. 196512131992031006



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



# *Piagam Penghargaan*

Diberikan Kepada :

**KOTA YOGYAKARTA**

Atas

Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan Skor **3,4581** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi**

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Jakarta, 25 April 2020

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Drs. Akmal Malik, M.Si



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENGHARGAAN**  
**KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM**

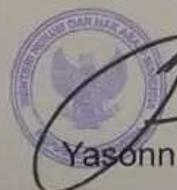
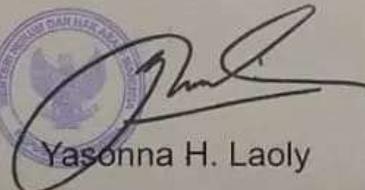
NOMOR: M.HH-02.HA.02.01.01 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021

Jakarta, 5 Desember 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

  
  
Yasonna H. Laoly





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

diberikan kepada

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

atas **Pemenuhan Kepatuhan Perpajakan Instansi Pemerintah  
Tahun Pajak 2022** di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Yogyakarta



Andi Setiawan



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦠꦶꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

**PIAGAM PENGHARGAAN**

NOMOR 001 / 51 / 2022

DIBERIKAN KEPADA :

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**

**ATAS PENCAPAIAN PERINGKAT II**

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI KOTA  
YOGYAKARTA (NILAI 88,80) DENGAN RPREDIKAT:

**A (MEMUASKAN)**

YOGYAKARTA, 19 Juli 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

